

SEUNEUBOK LADA

Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Kependidikan

Vol. 12 No. 1 (2025): 81-100, DOI. 10.33059/jsnbl.v12i1.11702

ISSN:2356-0770; E-ISSN:2685-2705

SURAT KABAR AL-WIVAC TAHUN 1925: PROTES UMAT ISLAM YOGYAKARTA TERHADAP PEMERINTAH KOLONIAL HINDIA BELANDA

Wanda Marshanda¹, Ibnu Sodik²

Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang

washandaa23@students.unnes.ac.id¹, ibnusodik@mail.unnes.ac.id²

ABSTRACT

During the Dutch colonial period in the Dutch East Indies, the government implemented a policy requiring Muslims to obtain permission to worship outside of mosques. This policy sparked protests, one of which was reported in the Al-Wivac newspaper in 1925. The purpose of this study is to explain the role and influence of the Al-Wivac newspaper's coverage of worship permits in 1925 on the Dutch East Indies colonial government's regulations. The research method used in this paper is the historical research method, which includes: heuristics or source collection, source criticism, interpretation, and historiography. The results of this study indicate that the Al-Wivac newspaper played an important role as a platform for Muslims to communicate. Additionally, Al-Wivac was used as a medium for Muslims to voice their opinions regarding the Dutch East Indies government's policies, which were deemed unfair and restrictive, preventing Muslims from holding Eid al-Fitr prayers in open fields. Unfortunately, the protests carried out by Muslims in various newspapers were insufficient to persuade the Dutch East Indies government to abolish or amend the regulations regarding permission for Eid al-Fitr prayers in open fields. However, restrictions on worship in open fields began to be relaxed in 1934, a development that was not unrelated to Muhammadiyah's efforts to criticize and pressure the government. This study highlights the role of the Islamic press as a tool for criticizing colonial policies, while also revealing the limitations of its influence in changing regulations.

Keywords: Al-Wivac newspaper, Eid al-Fitr prayer news, Government Wisdom, Muslim community

ABSTRAK

Pada masa kolonial Hindia Belanda, pemerintah memberlakukan kebijakan yang mewajibkan umat Islam mengantongi izin untuk melaksanakan ibadah di luar masjid. Kebijakan ini memicu protes, salah satunya melalui pemberitaan surat kabar Al-Wivac tahun 1925. Tujuan dari penelitian ini ialah menjelaskan bagaimana peran serta pengaruh pemberitaan izin ibadah dalam surat kabar Al-Wivac di tahun 1925 terhadap peraturan pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini ialah metode penelitian sejarah yang meliputi: heuristik atau pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian ini yaitu surat kabar Al-Wivac berperan penting sebagai wadah bagi umat Islam untuk berkomunikasi, selain itu Al-Wivac juga dijadikan sebagai media bagi umat Islam untuk menyuarakan pendapatnya mengenai kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang dianggap tidak

adil dan mengekang umat Islam untuk menyelenggarakan Salat Idul Fitri di lapangan. Protes-protes yang dilakukan oleh umat Islam di berbagai surat kabar sayangnya tidak cukup untuk membuat pemerintah Hindia Belanda menghapuskan ataupun mengubah peraturan mengenai izin Salat Idul Fitri di lapangan. Meskipun demikian, perizinan mengenai ibadah di lapangan mulai dilonggarkan pada tahun 1934 hal ini tidak lepas dari upaya Muhammadiyah dalam mengkritik dan menekan pemerintah. Penelitian ini menunjukkan peran pers Islam sebagai alat kritik kebijakan kolonial, sekaligus mengungkap keterbatasan pengaruhnya dalam perubahan regulasi.

Kata Kunci: surat kabar Al-Wiwac, Pemberitaan Salat Idul Fitri, Kebijakan Pemerintah, masyarakat Islam

PENDAHULUAN

Memasuki akhir abad ke-19 Agama Islam di wilayah Hindia Belanda semakin berkembang, hal ini dibuktikan dengan munculnya pemikiran serta sebuah gerakan yang berupa ajakan maupun anjuran tentang Agama Islam dari perorangan serta kelompok masyarakat. Tidak hanya itu, pada abad ini juga mulai hadir kesadaran umat Islam jika mereka masih menggunakan cara tradisional untuk berdakwah maka mereka tidak mungkin dapat berkompetisi dalam menghadapi kekuatan pemerintah kolonial Hindia Belanda (Noer, 1982). Bermula dari pemikiran tersebut, maka muncullah gerakan-gerakan modern Islam baik yang bergerak dalam bidang pendidikan, politik maupun sosial. Bangsa Belanda pada awalnya tidak begitu peduli ataupun tertarik terhadap penyebaran agama dalam rangka penaklukannya di Hindia Belanda, mereka lebih fokus terhadap upaya untuk mencapai keuntungan ekonomi melalui perdagangan. Di samping itu, Belanda juga tidak melakukan campur tangan langsung dalam urusan Agama Islam dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai Agama Islam, bahasa Arab serta struktur sosial Islam.

Kesadaran pemerintah kolonial mengenai eksistensi Agama Islam mulai tumbuh ketika banyaknya jemaah Indonesia yang berangkat Haji ke Makkah. Pemerintah cemas para jemaah Haji akan membawa ide-ide keislaman yang didapat selama beribadah di Makkah (McFate, 2019). Oleh sebab itu, pemerintah kolonial berupaya untuk mengatasi hal tersebut dengan cara mengirimkan Christian Snouck Hurgronje ke Makkah pada tahun 1884 guna mempelajari hubungan antara jemaah Haji dengan kekuatan politik Islam di Nusantara (Burhanudin, 2014). Menurut pemikirannya, dalam mengendalikan perlawanan penduduk jajahan tidak selalu memerlukan penggunaan senjata. Ia memberikan dua saran penting kepada pihak pemerintah tentang politik Islam yang hendak dijalankan. Pertama, pemerintah harus memperhatikan nasib umat Islam dengan

politik Islam yang tepat. Kedua, apabila terdapat sekelompok kecil orang Belanda yang tidak memahami tentang Islam serta memiliki keinginan untuk melakukan perlawanan bagi Islamisme di Hindia Belanda sebaiknya diabaikan saja (Jung, 2010; Putuhena, 2007).

Dalam pandangan politiknya, Snouck tidak menganggap ada ancaman apa pun dari perlawanan masyarakat Hindia Belanda yang sedang dijajah, kecuali jika hal itu terkait dengan fanatisme keagamaan, khususnya dalam konteks Agama Islam. Berdasarkan pandangannya mengenai politik Islam di Hindia Belanda, maka dirumuskanlah lima kebijakan pokok (Bertrand, 2006), yaitu: (1) Pemerintah kolonial Hindia Belanda tidak boleh ikut campur dalam ajaran maupun ibadah umat Islam. (2) Pihak pemerintah wajib menghargai hukum Islam yang mengatur perkawinan, keluarga, keturunan serta status pribadi karena hal itu termasuk ke dalam ajaran agama. (3) Pemerintah wajib mewaspadai serta menindak tegas faktor-faktor politik dari dalam Islam. (4) Pemerintah tidak boleh melarang ibadah Haji. Snouck berpendapat bahwa ibadah Haji tidak membuat umat Islam menjadi fanatik buta dan memusuhi pemerintah. (5) Pemerintah diminta untuk memberikan pendidikan Barat kepada rakyat pribumi untuk mendamaikan Islam dengan Barat. Namun, pada kenyataannya sikap pemerintah kolonial terhadap Agama Islam tidak konsisten. Di satu sisi Islam dianggap sebagai sebuah agama akan tetapi, di sisi lain mereka membuat kebijakan yang mendiskriminasi umat Islam dengan memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan misionaris Kristen. Hal ini dapat dilihat ketika pemerintah memberikan bantuan finansial yang lebih besar serta mengizinkan misionaris Kristen untuk bebas beroperasi di berbagai wilayah (Suminto, 1985).

Selain itu, terdapat kebijakan lain yang membuat umat Islam merasa kesulitan, kebijakan tersebut berkenaan dengan pengawasan kegiatan beribadah. Umat Islam menganggap bahwa peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial membatasi kemerdekaan mereka dalam menyebarkan Agama Islam. Salah satu insiden yang mengecewakan umat Islam yaitu kebijakan terkait izin pelaksanaan Salat Idul Fitri selain di masjid (tanah lapang), yang menurut umat Islam kebijakan tersebut baru mereka jumpai. Oleh karena itu, untuk menunjukkan kekecewaan mereka terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah, maka dibutuhkan sebuah wadah guna menampung aspirasi-aspirasi sebagai bentuk protes, salah satu wadah yang digunakan untuk mendukung hal tersebut ialah surat kabar. Surat kabar merupakan sebuah media cetak yang diterbitkan secara umum, teratur dan berisi berbagai macam informasi aktual mengenai berbagai

aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, dan budaya. Pemakaian surat kabar juga berperan dalam membentuk opini publik sehingga dapat memengaruhi pandangan masyarakat mengenai isu-isu politik maupun sosial. Penting untuk dicatat bahwa pada masa tersebut, media elektronik seperti radio belum banyak digunakan sebab teknologi ini masih terbilang baru maka dari itu belum banyak dikenal oleh masyarakat. Akibatnya, surat kabar menjadi salah satu sumber informasi yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Dengan demikian pada masa itu surat kabar memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk persepsi serta kesadaran politik masyarakat (Balahmar, 2021; Efendi, 2010).

Seiring berjalannya waktu, peran surat kabar semakin meningkat, salah satunya sebagai alat komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Dalam perspektif komunikasi klasik, Harold D. Lasswell menjelaskan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari sumber kepada penerima melalui media tertentu, dengan tujuan menghasilkan efek atau perubahan tertentu pada penerima (Lasswell, 1948). Komponen komunikasi menurut Lasswell mencakup lima elemen utama: pengirim (*source*), pesan (*message*), media (*channel*), penerima (*receiver*), dan efek (*effect*). Dalam konteks penelitian ini, kelima unsur tersebut dapat diidentifikasi secara konkret pada surat kabar Al-Wivac.

Pengirim pesan adalah pihak redaksi dan beberapa penulis berita dalam surat kabar Al-Wivac, pesan yang disampaikan berupa kritik terhadap kebijakan dan ketidakadilan pemerintah kolonial, media yang digunakan adalah surat kabar cetak, penerima adalah masyarakat pembaca di Hindia Belanda dan Timur Tengah, dan efek yang ditimbulkan mencakup pembentukan opini publik serta perubahan sikap kritis terhadap penjajahan. Dilihat dari konsep dan komponen komunikasi, surat kabar Al-Wivac juga dapat dikatakan sebagai ruang publik bagi masyarakat untuk berdiskusi secara rasional. Hal ini sejalan dengan teori Public sphere atau ruang publik, konsep yang diperkenalkan oleh filsuf dan sosiolog Jerman, Jurgen Habermas, dalam bukunya *The Structural Transformation of the Public Sphere*. Secara sederhana, public sphere merupakan sebuah ruang di mana warga masyarakat dapat berkumpul, berdiskusi, dan bertukar pandangan secara bebas mengenai isu-isu yang menjadi kepentingan bersama tanpa tekanan atau intervensi dari negara, pemerintah, atau kepentingan ekonomi tertentu (Habermas, 1991).

Surat kabar Al-Wivac dalam konteks ini bukan sekadar saluran informasi satu

arah, melainkan sebagai sarana diskusi bersama yang memungkinkan masyarakat menyampaikan kepentingan mereka dalam membentuk opini kolektif. Melalui kritik yang disampaikan oleh Al-Wivac terhadap pemerintah kolonial, surat kabar ini tidak hanya menjalankan fungsi komunikasi seperti dijelaskan oleh Lasswell, tetapi juga mengaktivasi ruang publik dalam pengertian Habermas yakni sebagai media pembentukan kesadaran kolektif dan resistensi politik masyarakat terhadap kekuasaan kolonial. Dengan demikian, Al-Wivac merupakan contoh konkret bagaimana media cetak dapat berfungsi ganda: Sebagai media komunikasi langsung dan juga sebagai alat untuk membangkitkan kesadaran dan membebaskan masyarakat dari ketidakadilan melalui pendekatan kritis

Dengan demikian, surat kabar menjadi penting bagi pemerintah maupun masyarakat dalam konteks kehidupan negara. Pemerintah mengharapkan dukungan dan kepatuhan dari masyarakat guna melaksanakan program-program serta kebijakan negara. Di samping itu, masyarakat ingin mengetahui program-program dan kebijakan pemerintah yang telah, sedang atau akan dilaksanakan. Al-Wivac menjadi salah satu surat kabar yang memberitakan berbagai peristiwa di Hindia Belanda serta menjadi media kritik terhadap kebijakan pemerintah kolonial.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai peran surat kabar sebagai media yang digunakan untuk merespons berbagai kejadian maupun sebagai media protes terhadap kebijakan pemerintah. Namun, pembahasan yang lebih spesifik mengenai surat kabar Al-Wivac hanya terdapat satu saja yaitu karya Saripatul Mukaromah dan Usep Abdul Matin yang berjudul “Peranan Surat Kabar Al-Wivac (Permufakatan) Sebagai Media Komunikasi antara Muslim Indonesia dengan Muslim di Timur Tengah pada tahun 1923-1925. Penelitian sebelumnya berfokus pada peran Al-Wivac sebagai media komunikasi antara Muslim Indonesia dan Timur Tengah serta membahas seluruh pemberitaan yang dimuat dalam surat kabar Al-Wivac sehingga fokus terhadap pemberitaan izin Salat Idul Fitri serta dampak dan pengaruhnya masih sangat minim.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui sejarah berdirinya surat kabar Al-Wivac; (2) Mengetahui peran surat kabar Al-Wivac dalam pemberitaan Salat Idul Fitri di Yogyakarta tahun 1925; (3) Mengetahui pengaruh pemberitaan surat kabar Al-Wivac terhadap kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda kepada umat Islam di Yogyakarta. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kajian sejarah media dengan menunjukkan peran pers

Islam sebagai alat resistensi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang merupakan sebuah proses menguji dan menganalisis rekaman dan peninggalan masa lampau secara kritis. Metode sejarah meliputi empat tahapan, yaitu: (1) Heuristik, sebuah tahap pertama yang dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber maupun data-data sejarah baik sumber primer maupun sekunder. Pengumpulan sumber sangat penting untuk dilakukan agar peneliti mendapatkan data-data yang dibutuhkan baik secara tertulis maupun lisan. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah surat kabar *Al-Wiwac Melayu* terbitan tahun 1925 dan 1926, sedangkan untuk sumber sekunder yang digunakan yaitu buku, artikel jurnal dan skripsi yang diperoleh dari Perpustakaan Jurusan Sejarah UNNES, Perpustakaan Sejarah UIN Jakarta, iPusnas Digital Library dan iJakarta Digital Library. (2) Kritik Sumber, setelah mengumpulkan berbagai sumber sejarah yang diperoleh pada tahap heuristik, maka tahapan selanjutnya ialah kritik sumber. Kritik sumber merupakan tahap yang dilakukan oleh peneliti untuk menguji naskah sumber seperti dokumen, pidato, sidik jari, foto, pengamatan, atau apa pun yang menjadi sumber pengetahuan. Tahap ini dilakukan untuk menentukan autentisitas dan kredibilitas dari bahan-bahan sumber tersebut (Sjamsudin & Ismaun, 1996). Kritik sumber dilakukan dengan dua tahapan, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal yaitu memeriksa kondisi kertas, tanggal terbit, jenis tulisan hingga ejaan yang digunakan. Kritik internal dilakukan untuk mengetahui kebenaran dari isi dokumen yang telah lolos dari tahap kritik eksternal. (3) Interpretasi, ialah sebuah upaya untuk menafsirkan fakta-fakta sejarah dalam kerangka rekonstruksi realitas masa lampau (Kuntowijoyo, 2003). Pada tahap ini peneliti memberikan tafsiran, pendapat, dan analisis terhadap fakta-fakta yang telah diperoleh dan diverifikasi. Interpretasi dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peristiwa sejarah. Namun, interpretasi harus dilakukan secara selektif dan tidak melebar ke mana-mana, hanya fakta-fakta yang penting dan sesuai dengan topik yang dapat diinterpretasikan. Terdapat dua jenis interpretasi dalam penelitian sejarah, yaitu interpretasi analisis dan interpretasi sintesis. Dalam penelitian ini jenis interpretasi yang digunakan yaitu, interpretasi analisis karena lebih fokus mengidentifikasi unsur sebab akibat, hubungan logis dan kronologi peristiwa. (4) Historiografi, merupakan tahap akhir dalam penelitian sejarah yang meliputi penulisan

hasil penelitian sejarah dalam bentuk karya tulis seperti buku, artikel, atau makalah (Gottschalk, 1975). Historiografi menjadi sarana untuk mengomunikasikan hasil penelitian yang telah diungkap, diuji, dan ditafsirkan. Dalam tahap historiografi peneliti menyajikan hasil penelitian dalam bentuk sebuah cerita sejarah yang tersusun secara sistematis dan kronologis dengan bentuk analisis deskriptif. Dengan kata lain, cerita sejarah tersebut harus mengandung informasi yang akurat dan dapat dipercaya, serta dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peristiwa sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Surat Kabar Al-Wivac

Al-Wivac merupakan salah satu surat kabar berbahasa Arab yang ada di Indonesia serta terbit pada tanggal 1 November tahun 1923 di wilayah Buitenzorg (Bogor) . Kata Al- Wivac berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti sebagai permufakatan yang diharapkan melalui nama tersebut, surat kabar ini menjadi tempat untuk mencari kebenaran yang berdasarkan keislaman. Selain sebagai permufakatan, Al-Wivac juga dipadankan sebagai anggota tubuh manusia yang berbeda-beda namun tetap dapat menyempurnakan pekerjaan dari manusia. Oleh karena itu, keharmonisan serta keseimbangan jiwa yang dirasakan oleh anggota tubuh dapat menuntaskan tugas seseorang secara sempurna dan utuh. Begitu pula dengan keberadaan umat Islam di dunia ini sulit mengetahui kondisi keislaman yang terjadi di berbagai tempat lainnya, sulit mencari kemiripan serta mewujudkan permufakatan. Sehubungan dengan itu, Alfattah dalam surat kabar Al-Wivac mengatakan bahwa diwajibkan bagi umat Islam diseluruh dunia untuk mempelajari bahasa Arab (Alfattah, 1925b). Namun untuk di wilayah Hindia Belanda, Alfattah memutuskan untuk mengeluarkan Al-Wivac berbahasa melayu, hal ini dilakukan karena sekitar 95% orang Hindia Belanda melupakan bahasa melayu (Alfattah, 1925b). Alfattah berharap dengan diterbitkannya Al-Wivac berbahasa melayu dapat memudahkan umat Islam di wilayah Hindia Belanda dalam bertukar pikiran dan saling mengingatkan. Surat kabar Al-Wivac dimaksudkan untuk para cendekiawan yang memahami tentang politik sehingga besar harapan bahwa mereka dapat menciptakan persatuan umat Islam di seluruh dunia. Pemikiran mengenai persatuan umat Islam tersebut merupakan sebuah tanggapan atas kemunduran umat Islam yang terjadi karena adanya tekanan dari penjajah. Gagasan tersebut terinspirasi dari peristiwa sejarah masa lalu yang berisikan perjuangan dan pengorbanan dalam mempertahankan nilai-nilai serta

aspirasi ilahiah, yaitu melawan kelompok orang-orang yang tidak beriman (Mukaromah & Matin, 2023)

Pada awal penerbitannya, Al-Wivac memakai bahasa Arab sehingga pada saat itu disebut dengan Al-Wivac Arabi yang bertujuan untuk menggulingkan kekuasaan Syarif Husein di Makkah melalui berita-berita yang diterbitkan, karena pada saat ia memerintah banyak kejadian yang berupa perpecahan, penindasan serta perbuatan sewenang-wenang. Al-Wivac juga dijadikan sebagai sarana propaganda untuk mendukung Ibnu Saud menjadi pemimpin umat Islam di dunia setelah penghapusan sistem Khilafah di Turki pada tahun 1924. Meskipun penerbitannya didorong oleh tujuan propaganda, Al-Wivac banyak mengajak umat Islam di seluruh dunia untuk bersatu. Selama periode penerbitannya, surat kabar Al-Wivac dipimpin oleh kepala redaktur yang merupakan seorang jurnalis Arab dari Makkah, ia bernama Mohamad bin Said Alfattah. Kedatangannya di Indonesia terjadi sekitar tahun 1920-an guna mengupayakan dukungan dari orang-orang Arab baik moral maupun finansial yang pada saat itu berada di Indonesia. Dengan demikian, target utama dalam penerbitan surat kabar Al-Wivac ialah orang-orang keturunan Arab. Hal ini sejalan dengan pernyataan Alfattah dalam surat kabar Al-Wivac yang berusaha mendapatkan dukungan utama dari masyarakat keturunan Arab, yang isinya sebagai berikut:

“Bagaimana poela seroean kita kepada saudara-saudara kita orang Arab, tidakkah saudara-saudara mengetahoei, kebakaran, kemoesnahan, kedjahatan, pengchianatan yang telah berlakoe...Tinggal diam sadjakah toean-toean, masi sadjakah saudara-saudara enak-enak menjimpan doeit dibank dengan tidak maoe mengeloerkannja barang sepeser boeat membantoe agama, bangsa, dan tanah air toean-toean” (“Djebaldroes,” 1925)

Pada saat itu terdapat beberapa kabar yang didirikan oleh orang-orang keturunan Arab yang datang ke Hindia Belanda, dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan moral dan finansial dari para penduduk yang keturunan Arab. Hampir semua surat kabar Arab yang berkembang di Hindia Belanda pada periode ini lebih fokus menerbitkan sebuah berita yang berkaitan dengan isu pendidikan, namun terdapat empat surat kabar yang lebih fokus membahas peristiwa yang menjurus ke arah politik, yaitu surat kabar Al-Wivac, Al-Kuwayt wa’l Iraqi, Al-Tawhid, dan Al-Haqq (Mobini, 1996).

Alfattah mempunyai ide-ide pikiran yang cenderung ke arah Wahabi yang lebih mendukung Ibnu Saud menjadi khalifah umat Islam di dunia serta menganjurkan umat Islam untuk kembali ke ajaran Al-Quran dan Hadist. Tidak hanya Alfattah yang berada

dalam tubuh Al-Wivac, terdapat pula seorang redaktur yang bernama Joesoef Samah. Mereka bekerja sama untuk mendirikan kantor dan mencetak surat kabarnya di Buitenzorg (Bogor). Kemudian, di tahun 1925 mereka memutuskan untuk menerbitkan surat kabar Al-Wivac dengan menggunakan bahasa Melayu serta huruf Latin. Sang kepala redaktur yaitu Alfattah menganggap bahwa huruf Latin yang merupakan huruf kaum Bumiputera sudah banyak ditinggalkan. Ia juga mengatakan bahwa bahasa di dalam suatu bangsa mencerminkan tradisi, etika, dan struktur sosial bangsa tersebut sehingga bahasa bangsa harus diketahui sepenuhnya serta bahasa lain dipelajari guna menambah ilmu pengetahuan (Alfattah, 1925b). Oleh sebab itu, surat kabar Al-Wivac terbagi menjadi dua jenis yaitu Al-Wivac Arabi dan Al-Wivac Melayu. Di kedua jenis surat kabar tersebut Alfattah juga menerapkan ide Pan Islamisme dalam surat kabar Al-Wivac. Pan Islamisme merupakan ideologi politik yang bertujuan untuk mempersatukan seluruh umat Islam di dunia dalam satu komunitas atau kesatuan guna melawan dominasi kolonialisme dan imperialisme Barat serta mengatasi perpecahan internal umat Islam (Zahra & Fatimah, 2023). Tokoh-tokoh utama Pan Islamisme yaitu Jamaluddin Al-Afghani seorang penggagas Pan Islamisme, Muhammad Abduh seseorang yang menyebarkan Pan Islamisme di Mesir serta terdapat Rasyid Ridha yang menyebarkan Pan Islamisme di berbagai negara muslim salah satunya Indonesia. Penggunaan Pan Islamisme dalam Al-Wivac dapat dilihat dari tema kecil yang tertera pada halaman pertama di setiap terbitannya.

Dipublikasikannya Al-Wivac Melayu bertujuan untuk memberikan informasi bagi penduduk Indonesia mengenai pergerakan-pergerakan umat Islam di Indonesia, Arab, Hindustan serta negara-negara Timur Tengah dengan judul besar *“Al-Wivac: Soerat Chabar Minggoean Berdasar Politiek Berazaskan Islam, Soera Oemmat Islam Sedoenia”*. Kehadiran Al-Wivac melayu disambut dengan antusias oleh para pembaca di Hindia Belanda yang belum menguasai bahasa Arab. Mereka sangat mengapresiasi surat kabar Al-Wivac karena telah menerbitkan edisi bahasa Melayu. Pernyataan ini tercantum dalam surat kabar Al-Wivac Melayu yang isinya sebagai berikut:

“Boekan main rasa kegembiraan hati kami itoe sampai moendar-mandir kian kemari oentoek membawa sitjantik Al-Wivac Melajoe. Kami toendjoek-toendjoekkan pada saudara-saudara jang beloem faham betoel pada bahasa Arab. Ja mesti sebab soedah lama dinanti-nanti oleh saudara-saudara kami mendjelmanja itoe Al-Wivac bahasa Melajoe”(Diflaa, 1925)

“...Dengan mendjelmanja Al-Wivac Melajoe, di Indonesia ini mendatangkan kebadjikan kepentingan besar bagi orang-orang Islam di sini jang sedang

menoenggoe datangnja Hakim” (Moechadam, 1925)

Di samping itu, Al-Wivac juga memberikan kesempatan bagi siapapun yang hendak diskusi maupun menjelaskan kondisi dan pergerakan Islam di seluruh dunia. Walaupun berasaskan politik Islam, tujuan utama dari surat kabar ini yaitu untuk mempersatukan umat Islam di seluruh penjuru. Hal ini dapat dilihat ketika ia menyampaikan manfaat Al-Wivac, yaitu *“Menjerroe soepaja koeat dan rapat persatoean Oemmat Islam oemoem diatas doenia ini”* (Alfattah, 1925c). Selain itu, Al-Wivac juga menerangkan kegunaan-kegunaan lain dari surat kabar Al-Wivac dalam terbitan pertama edisi Melayu, sebagai berikut: Sebagai media yang mewartakan berbagai berita keislaman agar persatuan umat Islam di dunia semakin kuat; untuk menyatukan gagasan-gagasan yang dikeluarkan oleh umat Islam seperti yang dilakukan oleh umat Islam di wilayah Timur; untuk memajukan Agama Islam dengan memaparkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Islam; selain itu, Al-Wivac juga memiliki kegunaan sebagai media untuk memberitakan dan mengurus Jamaatal Khilafah (Komite Khilafah) mengenai berbagai kejadian, peristiwa dan masalah yang terjadi di Hindustan, Kairo, Tunisia serta Indonesia (Alfattah, 1925c)

Dalam mewujudkan persatuan umat Islam di seluruh bagian dunia, Al-Wivac mengirimkan surat kabar terbitannya sebanyak 25 lembar ke Kairo dan 50 lembar ke Makkah yang kemudian disebarkan pula kepada para pendatang yang berasal dari Jawa, Melayu, Siam dan sebagainya yang sedang menempuh pendidikan agar mereka mengetahui kondisi perkembangan umat Islam di negerinya masing-masing. Di Hindia Belanda surat kabar Al-Wivac tersebar di beberapa daerah (Jakarta, Samarinda, Pontianak, Lampung, Yogyakarta, Pekalongan) yang masing-masing terdapat agen-agen surat kabar tersebut (Mukaromah & Matin, 2023). Untuk berlangganan surat kabar Al-Wivac di wilayah Hindia Belanda yaitu sebesar tiga gulden untuk tiga bulan, enam gulden untuk enam bulan dan sepuluh gulden untuk berlangganan selama setahun. Sementara itu, untuk pelanggan dari luar wilayah Hindia Belanda dikenakan biaya sebesar empat gulden untuk tiga bulan, delapan gulden untuk enam bulan dan dua belas gulden untuk setahun. Bagi para pelanggan yang ingin membaca surat kabar Al-Wivac tanpa berlangganan dapat membeli setiap lembarnya dengan harga 0,25 gulden. Di samping itu, Al-Wivac menyediakan kolom iklan dengan tarif 0,15 gulden per baris, dengan ketentuan minimal iklan sebanyak dua gulden. Penjelasan mengenai biaya langganan surat kabar Al-Wivac dapat dilihat pada halaman pertama di setiap terbitannya.

Sepanjang mendistribusikan surat kabar Al-Wivac tentunya tidak selalu berjalan lancar, adakalanya mereka mengalami kendala di mana mereka harus berpindah-pindah tempat mengganti tempat percetakan selama beberapa kali (Alfattah, 1926). Hal ini dikarenakan adanya hasutan yang dilakukan oleh orang yang bernama Alawi dan Achmad Badjenet sebab mereka memiliki rasa tidak suka terhadap Al-Wivac yang menerbitkan berita-berita mengenai kezaliman Husein yang membuat para pengikutnya mengalami kesulitan dan marah. Oleh karena itu, Al-Wivac memindahkan percetakannya pada percetakan Borobudur, namun saat baru empat lembar saja yang keluar, proses pencetakannya diberhentikan karena pihak Borobudur meminta uang muka yang lebih tinggi, yaitu sepuluh gulden. Pada akhirnya Al-Wivac Melayu memutuskan untuk pindah percetakan ke wilayah Yogyakarta. Kesulitan selanjutnya menghampiri Al-Wivac dengan adanya masalah finansial yang ditimbulkan oleh para pelanggan karena mereka tidak membayar uang langganan serta iklan yang sangat sedikit juga membuat Al-Wivac tidak dapat memperpanjang masa terbitnya.

Peran Surat Kabar Al-Wivac dalam Pemberitaan Salat Idul Fitri di Yogyakarta Tahun 1925

Al-Wivac menjadi salah satu surat kabar yang memberitakan hal-hal yang berkaitan dengan gerakan-gerakan umat Islam di berbagai penjuru dunia. Surat kabar ini secara jelas memperlihatkan haluan politiknya yang berasaskan Islam yang selalu terlihat dalam halaman pertama terbitan-terbitannya. Hal ini sejalan dengan tujuan Al-Wivac yang berupaya untuk memperkuat persatuan umat Islam. Salah satu berita yang dimuat dalam surat kabar Al-Wivac untuk kepentingan umat Islam yaitu mengenai perizinan ibadah yang ditampilkan dengan judul “Sembahjang Mesti Permissi”. Berita ini merupakan sebuah bentuk perlawanan Al-Wivac terhadap kolonialisme Belanda yang terjadi di Indonesia. Al-Wivac menjadi media untuk memprotes kebijakan pemerintah yang dianggap menyulitkan pergerakan umat Islam di Indonesia. Bahkan menurut surat kabar Al-Balag yang dikutip dalam surat kabar Al-Wivac tanggal 1 September tahun 1925, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan hal yang baru bagi mereka karena tidak ada larangan maupun peraturan yang seperti itu di negara lain (“Bertjoejoeran Air Mata Oemmat Islam,” 1925).

Berita Sembahjang Mesti Permissi bermula ketika Al-Wivac mengutip dari Hindia Baroe No. 127 tanggal 11 Juni 1925 perihal pemanggilan pengurus Jama'atal Muhammadiyah di Yogyakarta yaitu A.H Fachrudin, A.S. Djojosoegito dan A.R. Pringgonoto yang dilakukan oleh asisten residen di tanggal 2 Juni 1925 pada pukul 11 siang. Pemanggilan tersebut bertujuan untuk membicarakan perihal Salat Idul Fitri yang dilakukan oleh umat Islam di Yogyakarta pada tempat selain masjid. Asisten residen mengatakan bahwa pelaksanaan ibadah di tempat terbuka wajib untuk mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemerintah. Surat kabar Al-Wivac melepaskan kekesalannya mengenai pemerintah yang dianggap telah mencampuri urusan agama dan ibadah umat Islam melalui isi berita yang diterbitkan sebagai berikut:

“Demikianlah makin lama makin sempit sadja lapangan tempat kita orang Islam mengerdjakan soeroehan Toehan kita. Kita sembahjang toch dengan tidak sedikit djoega mengganggu keamanan orang, dengan tidak sedikit djoega menggoda agama orang lain! Padahal kita sembahjang sadja kok mesti permissi, mengadjarkan Agama mesti permissi, dan nanti siapa tahoe barangkali kalau pergi kentjing sadja djoega mesti permissi.” (Centraal Comite, 1925)

Al-Wivac yang mendistribusikan surat kabarnya ke berbagai wilayah membuat berita-berita yang dimuat diketahui oleh orang-orang Islam di belahan bumi lain, sehingga tidak mengherankan apabila berita Sembahjang Mesti Permissi sampai kepada Jamaatal Khilafah di Timur Tengah serta menarik minat mereka untuk ikut serta membahas permasalahan izin ibadah yang terjadi di Indonesia. Pemberitaan tersebut mendapatkan berbagai macam respons baik dari dalam maupun luar negeri. Dampak positif yang didapatkan dari berita yang dimuat ialah, banyaknya media yang ikut serta menyuarakan kebebasan dan keadilan umat Islam di Indonesia. Protes-protes yang dilakukan oleh surat kabar-surat kabar Islam selalu dimuat di dalam Al-Wivac agar umat Islam di Indonesia merasa bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi kebijakan pemerintah yang membatasi kegiatan keagamaan mereka. Setelah diterbitkannya berita tersebut, Jamaatal Khilafah di Kairo memberikan balasan surat kepada Alfattah, mereka mengirim protes melalui telegram kepada wazir (menteri) pihak Belanda perihal umat Islam di Jawa yang diwajibkan memperoleh izin untuk melaksanakan Salat Idul Fitri (Al-Gelini, 1925).

Selain itu, surat kabar lainnya yang ikut menyuarakan kekesalan dan kekecewaannya yaitu surat kabar Al Balag, Al liwa al Masi wal Achbar, Wadini,

Annasjarah al Azharia dan Al Ikbal. Surat kabar Al-Ikbal mengatakan bahwa ketika membaca berita mengenai izin beribadah, mereka tertawa sekaligus menangis di dalam hatinya mengenai hal yang dialami oleh umat Islam di Yogyakarta. Selain itu, terdapat pula rasa heran terhadap pemerintah yang mereka anggap terpelajar melakukan hal yang demikian menyakiti perasaan banyak umat Islam (“Sembahjang Misti Permissi: Aneh Dan ’Adjaib,” 1925). Selanjutnya Al-Wivac juga memuat berita yang dikutip dari surat kabar Annasjarh Al Azharia yang merasa menyesal atas semakin sempitnya kemerdekaan yang dimiliki oleh umat Islam di Indonesia, mereka merasa bahwa di masa itu seharusnya umat beragama diberikan kebebasan untuk melaksanakan ibadah apalagi saat itu sudah banyak orang-orang yang mendirikan masjid di Eropa seperti Inggris, Perancis dan Jerman yang pada dasarnya bukanlah negara Islam. Isi berita mengenai protes yang dilakukan oleh surat kabar Annasjarah Al Azharia dalam surat kabar Al-Wivac ialah sebagai berikut:

“Kita memprotest dengan soeara Alam Islam Sedoenia atas perboeatan hakim jang tidak memakai kebenaran itoe dan jang tidak menghormati Agama Boemipoetra. Kita mengharap dengan lekas perkara itoe diperiksa dan tidak keloeat dari batas” (“Islam Di Djawa,” 1925)

Protes lainnya yang dimuat dalam surat kabar Al-Wivac adalah isi surat perwakilan Jamaatal Khilafah yaitu Kamil Affandi Oesman, ia mengatakan bahwa kebijakan mengenai izin ibadah tersebut telah menghapuskan kebaikan yang dijanjikan oleh orang Eropa pada abad 20 dalam setiap kesempatan. Berikut adalah isi surat Kamil Affandi lainnya yang juga dimuat dalam surat kabar Al-Wivac:

“Kita comite memberitahoekan kepada j.m Minister van Kolonie Belanda tentang hal ihwal ini jang terliwat zalim, atas kehormatan toean kita minta soepaja toean tolong memperbaiki kezaliman itoe, sehingga saudara-saudara kita kaoem Moeslimoen di Djawa mendapat kemerdekaan agamanja, dan hal itoe djangan sampai mendjadi besar kedalam lobang jang telah diboeat oleh Eropah antara Timoer dengan Barat” (Al-Moehami, 1925)

Di samping dampak positif yang diterima oleh Al-Wivac dari pemberitaan izin ibadah tersebut, mereka juga mendapatkan dampak negatif dari beberapa surat kabar yang diduga lebih condong terhadap pemerintah kolonial Hindia. Salah satunya ialah Soerabaiasch Handelsblad yang mengkritik Al-Wivac di dalam berita-beritanya, mereka mengatakan bahwa berita izin ibadah yang dimuat dalam surat kabar Al-Wivac dianggap menjelek-jelekkan pemerintah di pandangan negara-negara Islam lainnya.

Selain itu, menurut Alfattah yang merupakan kepala redaktur Al-Wivac, pihak Soerabaiasch Handelsblad membuat berita yang narasinya dianggap menghasut

pemerintah untuk mengusir Alfattah dari wilayah Hindia Belanda. Berita tersebut dimuat ulang dalam surat kabar Al-Wivac melayu yang isinya sebagai berikut:

“Dalam s.k nja itoe beberapa lamanja ada memoeatkan karangan-karangan kedjahatan terhadap kepada Pemerintah Belanda....Ada lebih baik menoeroet pikiran kita apabila Mohamad bin Said Alfattah dikeloearkan dari tanah Hindia” (Al-Fattah, 1925)

Kemudian Soerabaiasch Handelsblad juga menyampaikan kepada para pembacanya bahwa Al-Wivac tidak hanya menerbitkan berita yang berisi kebohongan kepada kerajaan-kerajaan Islam di luar sana, ia juga dianggap telah menghadirkan permusuhan dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda serta menghasut orang-orang Arab yang berada di Hindia Belanda. Kemudian, Soerabaiasch Handelsblad juga memuat pemberitaan mengenai penangkapan Alfattah oleh polisi dan akan dikeluarkan dari Hindia Belanda karena permasalahan surat izin masuk. Isi berita Soerabaiasch Handelsblad yang dikutip oleh telegram Aneta dan diterbitkan pula dalam surat kabar Al- Wivac ialah sebagai berikut:

“wartaken bahoea journalist Arab toean Alfattah, redacteur dari soerat kabar Al-Wifak jang diterbitken di Buitenzorg, lantaran dianggep merah bakal dioesir dari Indonesia. Lebih djaoe katanja toean itoe tidak mempoejai toelatingspapieren” (Alfattah, 1925a)

Berita-berita miring yang dibuat oleh Soerabaiasch Handelsblad tidak dibiarkan begitu saja, Al-Wivac dalam surat kabarnya menanggapi berita tersebut dengan menyatakan bahwa Alfattah tidak dikeluarkan atau diusir oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Ia bahkan bertanya kepada seorang residen Bogor mengenai pengusiran tersebut namun, residen tersebut sama sekali tidak mengetahui perihal pengusiran. Kemudian, mengenai toelatingpapieren (surat izin masuk) pemerintah mengakui dalam bukunya terdapat catatan mengenai surat izin masuk tersebut. Dengan kata lain, surat kabar Al-Wivac mengonfirmasi bahwa berita-berita yang dibuat oleh Soerabaiasch Handelsblad itu bohong. Selain Soerabaiasch Handelsblad, surat kabar Hadramaut juga memuat berita tentang Al-Wivac yang akan dikeluarkan dari Hindia Belanda, mereka mengatakan bahwa Alfattah telah pergi ke Bogor bersama beberapa polisi dan selanjutnya ia akan dikeluarkan dari Hindia Belanda. Al-Wivac menanggapi berita surat kabar Hadramaut dengan menerbitkan sebuah tulisan yang isinya sebagai berikut:

“Bersama ini kita beritahoekan kepada saudara-saudara pembatja, boekankah tidak ada bedanja hasoetan s. k. Hadramaut dengan Soerb. Hdbl? Kedoea s. k. itoe telah berani menetapkan atau menentoekan kita dikeloerkan oleh Pemerintah dari Hindia Belanda, sedang ketetapanja itoe dari manakah ia mendapat boekti?” (“Maoe Menghasoet?,” 1925)

Komentar lain yang dikeluarkan oleh Soerabaiasch Handelsblad yang juga dikutip di dalam Al-Wivac mengenai pemberitaan Salat Idul Fitri di lapangan berisi sebagai berikut:

“Dalam soerat kabar tanggal 27 October kita membintjangkan perkara ini lebar dan pandjang; tjoekoeplah bagi pembatja, kalau kita hanya memperingatkan jang berikoet. Sewaktoe beberapa boelan j.l di Djokja bermaksoed hendak mendirikan sembahjang pada tempat jang terboeka boeat Rif-Kabijken, maka bestuur mempersalahkan, bahwa boeat mendirikan sembahjang itoe tidak akan diberi izin, karena sembahjang itoe didirikan boeat moesoeh dari satoe mogenheid jang kita berbaikan dengan dia” (“Soerb-Hdbl Menghasoet: Masih Selamanja Pemboesoekan,” 1926)

Dalam isi beritanya Soerabaiasch Handelsblad menganggap bahwa berita Sembahjang Mesti Permissi terlalu dilebih-lebihkan serta izin mengenai pelaksanaan ibadah di tempat terbuka hanya diperuntukkan bagi bangsa Riff Kabijlen (Maroko). Hal ini dapat terjadi karena sembahyang yang dilakukan oleh mereka ditujukan untuk musuh yang pada saat itu sedang menjalin perdamaian dengan kita.

Pengaruh Pemberitaan Surat Kabar Al-Wivac terhadap Kebijakan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda kepada Umat Islam di Yogyakarta

Pemberitaan mengenai izin ibadah dalam surat kabar Al-Wivac diterbitkan secara terus menerus, sehingga banyak umat Islam baik yang di dalam maupun luar negeri merasakan kekecewaan terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda. Protes-protes yang dilakukan oleh berbagai umat Islam di segala penjuru diharapkan dapat memberikan kebebasan dan keadilan bagi umat Islam di Indonesia. Dalam hal kebebasan, umat Islam ingin pemerintah memberikan kebebasan kepada mereka untuk melaksanakan ibadah selain di masjid tanpa memerlukan izin terlebih dahulu seperti yang dilakukan oleh umat Kristen. Hal ini diberitakan dalam surat kabar Al-Wivac, yang isinya sebagai berikut:

“... Tapi ditanah lapang Singa di Weltevreden ini sampai 2 atau 3 kali dalam seminggoe pihak Kristen berjanji dan berpedato di tempat ramai, openlucht, berpedato dan berjanji bagi penarik hati orang jang sampai beratoes-ratoes disana masoek Agama Kristen, djadi ichtiar soepaja bangsa kita Islam meninggalkan Agama nenek mojang kita, Agama Islam. Toch boleh pihak itoe berboeat demikian dengan ta'pernah mendapat ganggoean” (Centraal Comite, 1925)

Tak hanya itu, umat Islam juga merasa bahwa pemerintah Hindia Belanda sangat tidak adil antara umat Islam dan Kristen, selain mereka dibebaskan untuk melaksanakan

ibadah di mana saja, pemerintah Hindia Belanda juga rela mengeluarkan ratusan ribu gulden dalam setahun untuk umat Kristen. Hal ini tertera dalam surat kabar Al-Wivac yang isinya sebagai berikut:

“Ja, boekan sadja tidak dapat ganggoean malah-malah siapa kita jang tidak tahoe berapa ratoes riboe Pemerintah mengeloearkan oeang dalam setahoen bagi keperloean mereka jang hendak mengembangkan agama Kristen dalam kalangan kita Oemmat Islam, dinegeri Islam ini” (Centraal Comite, 1925)

Pemberitaan yang diterbitkan oleh surat kabar Al-Wivac ini berpengaruh terhadap eksistensi umat Islam yang berada di dalam maupun luar Hindia Belanda. Hal ini dapat terjadi karena berita-beritanya yang menyangkut perihal kekesalannya terhadap kebijakan izin ibadah di kawasan Hindia Belanda membuat umat Islam di berbagai belahan dunia menyatukan kekuatannya serta melakukan protes secara bersama-sama dalam tulisan-tulisan surat kabar Islam lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya umat Islam bukanlah sekumpulan manusia-manusia yang dapat ditindas dan diperlakukan secara tidak adil. Selain itu, umat Islam juga menunjukkan kepada pemerintah Hindia Belanda bahwa surat kabar dapat menjadi media untuk menyampaikan pendapatnya.

Pada akhirnya berbagai protes yang dimuat dalam beberapa surat kabar Islam masih belum cukup mempengaruhi pemerintah kolonial untuk mengubah peraturan izin ibadah bagi umat Islam di Hindia Belanda. Hal ini dapat terjadi karena ketika dilaksanakannya sebuah kongres Al Islam di Yogyakarta, permasalahan mengenai izin ibadah selain di masjid tidak ikut dibahas. Dalam surat kabar Al-Wivac dikatakan bahwa selama kongres tersebut berlangsung yang dilakukan hanyalah berganti-ganti pembicara saja yang menyampaikan perihal permasalahan agama seperti guru dalam sekolah serta keperluan-keperluan untuk perkumpulan mereka dan mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah memberikan ongkos-ongkos kursi (Samah, 1925).

“congres jang t.l di Djokjacarta itoe, hanya itoelah soeatoe congres di Indonesia jang mengoetamakan ke Islaman. Riboe kaoem Moeslimin ratoes perkoempoelan sama-sama datang mengoendjoenginja, tetapi kalau congres jang begitoe oetama toedjoeannja menjia-jiakan azasnja, tidak menetapi haloeannja, boekankah sia-sia adanja congres itoe.”(Samah, 1925)

Dalam penggalan berita di atas surat kabar Al-Wivac terlihat begitu kecewa terhadap kongres Al Islam yang dilaksanakan di Yogyakarta pada saat itu, sebab mereka

berpendapat bahwa kongres tersebut merupakan satu-satunya kongres di Indonesia yang menekankan nilai-nilai keislaman, di mana ribuan umat Islam dan ratusan organisasi berkumpul untuk mengahdirinya. Namun, sayangnya terasa sia-sia jika kongres yang dinanti-nantikan tidak mengikuti arah yang telah ditetapkan serta mengabaikan prinsip-prinsip yang seharusnya dipegang.

Setelah pemberitaan Salat Idul Fitri yang dimuat oleh Al-Wivac pada tahun 1925, masyarakat di Hindia Belanda masih diharuskan mengajukan izin untuk melaksanakan ibadah Salat Idul Fitri di luar masjid, terutama di tempat terbuka seperti lapangan. Izin tersebut diperoleh dari pihak kepolisian Hindia Belanda. Di tahun 1926 Muhammadiyah kembali melakukan Salat idul Fitri di lapangan, pada tahun ini juga kegiatan tersebut dilegitimasi dalam Muktamar Muhammadiyah ke-15 di Surabaya (Aisyah, 2025). Meskipun demikian, perizinan Salat Idul Fitri tetap dibatasi sejak tahun 1924-1934, hal ini dilakukan karena pemerintah khawatir akan adanya potensi kerumunan besar yang bisa menimbulkan gangguan ketertiban atau perlawanan politik. Keadaan ini berubah ketika Muhammadiyah menolak kewajiban izin resmi dari kepolisian, mereka merasa bahwa dengan memberikan pemberitahuan mengenai kegiatan yang dilakukan saja sudah cukup. Oleh sebab itu pada Kongres Muhammadiyah tahun 1934 diputuskan agar cabang-cabang Muhammadiyah cukup memberitahukan pelaksanaan Salat idul Fitri di lapangan untuk seluruh cabang Muhammadiyah (Anarki, 2024) .

KESIMPULAN

Dari uraian-uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa surat kabar Al-Wivac awalnya berupa surat kabar berbahasa Arab yang terbit di Bogor pada tahun 1923 dipimpin oleh Mohamad bin Said Alfattah beserta rekannya yang bernama Joesoef Samah. Al-Wivac diterbitkan awalnya untuk memperkuat persatuan umat Islam di seluruh dunia, agar umat Islam dapat saling membantu satu sama lain. Di tahun 1925 Alfattah menerbitkan surat kabar Al-Wivac yang berbahasa melayu yang bertujuan untuk memberitakan berbagai perkembangan umat Islam di dunia kepada umat Islam di Hindia Belanda. Untuk mencapai tujuannya dalam memperkuat persatuan umat Islam, Al-Wivac mengirimkan surat kabarnya ke berbagai negeri, sehingga berita-berita yang dimuat dapat diketahui oleh umat Islam di dunia. Salah satu berita yang menarik minat umat Islam ialah perihal izin ibadah selain di masjid yang berjudul “Sembahjang Mesti Permisi”. Setelah membaca berita yang dimuat oleh Al-Wivac, umat-umat Islam

ikut merasakan kekecewaan terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Kekecewaan mereka ditumpahkan dalam surat kabar-surat kabar Islam lainnya, seperti: *Al Balag*, *Al liwa al Masi wal Achbar*, *Wadini*, *Annasjarah al Azharia* dan *Al Ikbal*. Pemberitaan yang dilakukan oleh *Al-Wivac* memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif yang dirasakan ialah maraknya surat kabar yang ikut serta mengeluarkan pendapatnya mengenai kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang dianggap merugikan serta tidak adil terhadap umat Islam. Dampak negatif yang didapatkan oleh surat kabar *Al-Wivac* dari pemberitaan tersebut ialah banyaknya berita-berita yang diterbitkan oleh *Soerabaiasch Handelsblad* yang berisi hasutan serta kebohongan.

Pemberitaan mengenai izin ibadah berpengaruh terhadap keberadaan umat Islam baik di dalam maupun di luar negeri. Selain itu, banyaknya protes yang dilakukan di berbagai surat kabar menunjukkan kepada pemerintah bahwa umat Islam dapat memperkuat persatuannya sehingga mereka tidak dapat diperlakukan secara semena-mena. Di samping itu, pemberitaan yang dilakukan oleh *Al-Wivac* sayangnya belum dapat mempengaruhi pemerintah untuk mengubah kebijakan atau peraturan yang berkaitan dengan izin ibadah selain di masjid pada abad ke-20. Hal ini dapat dilihat ketika umat Muhammadiyah diharuskan untuk meminta izin secara resmi kepada kepolisian untuk melaksanakan ibadah Salat Idul Fitri di lapangan sejak tahun 1924 hingga 1934.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N. (2025). *Sejarah Salat Id di Lapangan pada Masa Kolonial Belanda, Organisasi Ini Pelopornya*. Detik.Com.
- Al-Fattah, M. . (1925, 10 November). Maoe Menghasoet? *Al-Wivac Melayu*, 3.
- Al-Gelini, H. (1925, 8 September). Sembahjang Mesti Permissi. *Al-Wivac Melayu*, 5.
- Al-Moehami, K. (1925, 10 November). Protest Djamaatal Chilafah. *Al-Wivac Melayu*, 3.
- Alfattah, M. . (1925a, 10 November). Soerabaiasch Handelsblad Membohong. *Al-Wivac Melayu*, 4.
- Alfattah, M. M. (1925b, 8 September). Satoekanlah Bahasa. *Al-Wivac Melayu*, 2.
- Alfattah, M. M. (1925c, 1 September). Pendahoeloean. *Al-Wivac Melayu*, 2.
- Alfattah, M. M. (1926, 6 Januari). Kesoeshan Al-Wivac dalam 3 Tahoen Perdjalan. *Al-Wivac Melayu*, 1–2.
- Anarki, R. L. (2024). *Sejarah Awal Mula Salat Idul Fitri di Lapangan Terbuka, Siapa Perintisnya?* Sea Today. <https://ramadan.seatoday.com/id/rahvana-lintas->

- anarki/3408/sejarah-muhammadiyah-pionir-salat-idulfitri-di-lapangan-terbuka
- Balahmar, A. R. U. (2021). Press freedom: Using the role of government and reporters in the development of democracy in Indonesia. *Academy of Strategic Management Journal*, 20(2), 1–10.
- Bertjoejoeran Air Mata Oemmat Islam. (1925, 1 September). *Al-Wivac Melayu*, 4.
- Bertrand, R. (2006). Dutch orientalism and empire-building: Colonial sciences and the birth of a “Muslim policy” in the Dutch East Indies. *Raisons Politiques*, 22(2), 95–117.
- Burhanudin, J. (2014). The dutch colonial policy on islam: Reading the intellectual journey of Snouck Hurgronje. *Al-Jami'ah*, 52(1), 25–58. <https://doi.org/10.14421/ajis.2014.521.25-58>
- Centraal Comite. (1925, 1 September). Sembahjang Mesti Permissi! *Al-Wivac Melayu*, 3.
- Difflaa. (1925, 1 September). Samboetan. *Al-Wivac Melayu*, 6.
- Djebaldroes. (1925, 1 December). *Al-Wivac Melayu*, 6.
- Efendi, A. (2019). *Perkembangan Pers di Indonesia*. ALPRIN.
- Gottschalk, L. (1975). *Mengerti sejarah: pengantar metode sejarah*. Yayasan Penerbit UI.
- Habermas, J. (1991). *The Structural Transformation Of The Public Sphere*. MIT Press
- Islam di Djawa. (1925, 15 September). *Al-Wivac Melayu*, 5.
- Jung, D. (2010). “Islam as a problem”: Dutch religious politics in the east Indies. *Review of Religious Research*, 51(3), 288–301.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Tiara Wacana.
- Lasswell, H. D. (1948). The Structure and Function Of Communication in Society. *In The Communication Of Ideas*. Institute for Religious and Social Studies.
- Lutfiyah, A. (2020). *Peran Koran Suara Merdeka terhadap Gerakan Mahasiswa di Semarang Tahun 1998*. (Skripsi, Universitas Negeri Semarang)
- Maoe Menghasoet? (1925, 1 Desember). *Al-Wivac Melayu*, 2.
- McFate, M. (2019). Useful Knowledge: Snouck Hurgronje and Islamic Insurgency in Aceh. *Orbis*, 63(3), 416–439. <https://doi.org/10.1016/j.orbis.2019.05.005>
- Mobini, N. (1996). The Arab Periodicals of the Netherlands East Indies, 1914-1942. *Bijdragen Tot de Taal-, Land-En Volkenkunde*, 1996.
- Moechadam, A. . (1925, 10 November). Gembira. *Al-Wivac Melayu*, 6.
- Mukaromah, S., & Matin, U. A. (2023). *Peranan Surat Kabar Al-Wivac (Permufakatan) Sebagai Media Komunikasi antara Muslim Indonesia dengan Muslim di Timur*

- Tengah pada Tahun 1923-1926.* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Jakarta).
- Noer, D. (1982). *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. LP3ES.
- Putuhena, M. (2007). *Historiografi Haji Indonesia*. LkiS.
- Samah, M. J. (1925, 8 September). Sembahjang Hadjat Bagi Orang Jang Hidoep Dipoe lau Djawa. *Al-Wivac Melayu*, 6.
- Sembahjang Misti Permissi: Aneh dan 'Adjaib. (1925, 15 September). *Al-Wivac Melayu*, 5.
- Sjamsudin, H., & Ismaun, H. (1996). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Depdikbud.
- Soerb-Hdbl Menghasoet: Masih selamanja pemboesoekan. (1926, 6 Januari). *Al-Wivac Melayu*, 2.
- Suminto, A. (1985). *Politik Islam Hindia Belanda*. LP3ES.
- Zahra, N., & Fatimah, F. (2023). Konsep PAN-islamisme menurut pemikiran Jamaluddin Al-Afghani dalam perkembangan partai politik di Indonesia. *Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 228. <https://doi.org/10.29210/1202322802>